

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompas.com dalam artikel yang dipublikasikan pada 11 Mei 2020 mengungkapkan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya mengumumkan kasus pasien positif mengidap Covid-19 pada 2 Maret 2020 (<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari>). Namun kasus tersebut diidentifikasi sebagai transmisi lokal atau penularan dari penduduk negara sendiri. Kompas.com menambahkan bahwa penularan virus sudah terjadi sejak bulan Januari. Oleh karena waktu penularan yang cukup singkat tersebut, pemerintah memberlakukan beberapa protokol kesehatan. Salah satu dari protokol kesehatan tersebut adalah menjaga jarak aman satu sama lain (*physical distancing*). Berdasarkan tulisan pada laman Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang diterbitkan pada 19 Juni 2020, jarak aman untuk melakukan *physical distancing* agar virus korona tidak menyebar adalah satu atau dua meter (<https://covid19.go.id/p/berita/ketua-gugus-tugas-jaga-jarak-mudah-diucapkan-tetapi-sulit-dilakukan>).

Dalam pengembangannya, *physical distancing* diwujudkan secara terstruktur melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemerintah secara resmi mencantumkan rincian kegiatan ini dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/09002161/6-bulan-pandemi-covid-19-catatan-tentang-psbb-dan-penerapan-protokol?page=all>). Pelaksanaan PSBB dilakukan dengan menerapkan empat buah syarat, yaitu: (1) membatasi pergerakan orang dan barang yang hendak masuk atau keluar provinsi, kabupaten, atau kota tertentu, (2) meliburkan sekolah dan tempat kerja, (3) membatasi

kegiatan keagamaan, dan (4) membatasi kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB memang memiliki tujuan baik, yaitu untuk menekan peredaran virus. Namun di balik pemberlakuan kebijakan tersebut, sektor perekonomian mengalami kemunduran. Dalam tulisan Sri Muryono yang diunggah pada 27 September 2020 di laman [antarane.ws.com](https://www.antarane.ws.com), disebutkan bahwa ekonomi Indonesia terancam mengalami resesi jika PSBB terus berjalan (<https://www.antarane.ws.com/berita/1750793/menyadari-dampak-ekonomi-imbak-psbb>). Oleh karena itu, diterapkanlah kelonggaran-kelonggaran agar tempat usaha masih dapat berjalan walaupun dengan beberapa aturan wajib, seperti disiplin protokol kesehatan, pembatasan jam operasional, dan pembatasan kapasitas pengunjung. Kelonggaran ini membawa dampak baik bagi pelaku usaha yang mengandalkan kehadiran khalayak untuk memperoleh penghasilan. Dalam penelitian ini, usaha pariwisata lah yang menjadi sorotan utama sehubungan dengan diterapkannya kelonggaran tersebut.

Desa Pongkok di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber penghasilan. Obyek wisata yang menjadi penghasilan inti dari Desa Pongkok adalah Umbul Pongkok. Umbul merupakan jenis wisata dari mata air alam. Di Pongkok sendiri, mata air tidak hanya dimanfaatkan untuk berenang saja, melainkan juga aktivitas *snorkling* dan pemotretan bawah air. Berdasarkan wawancara I Made Darna, wartawan Bali Tribune dengan Sugeng Rajarjo, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Pongkok pada 6 Agustus 2017, pendapatan yang diperoleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dari operasional Umbul Pongkok kurang lebih sebesar 14,2 milyar rupiah (<https://balitribune.co.id/content/menengok-bumdes-pongkok-tirta-mandiri-bumdes-terbaik-tingkat-nasional-sukses-jadi-mesin-uang>). Bumdes Tirta Mandiri sendiri sudah dirintis sejak 2009 dan bertanggung jawab untuk mengelola operasional Umbul Pongkok. Dalam sebuah artikel di laman Gemari.id yang diunggah pada 10 September 2019, disebutkan bahwa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menganugerahkan gelar desa terbaik kepada Desa Ponggok pada tahun 2017 atas keberhasilannya dalam mengoptimalkan potensi daerah (<https://gemari.id/gemari/2019/9/10/bumdes-tirta-mandiri-pongok-di-jawa-tengah-yang-makin-trendi>).

Pada masa pandemi covid-19, pengunjung Umbul Ponggok dilaporkan menurun drastis. Junaedi Mulyono, Kepala Desa Ponggok dalam wawancara dengan Taufiq Sidik Prakoso, wartawan Solopos.com pada 14 Februari 2021 mengungkapkan bahwa penurunan pengunjung mencapai hampir sembilan puluh persen dari jumlah normal akibat pemberlakuan PSBB (<https://www.solopos.com/pengelola-umbul-pongok-klaten-patungan-hingga-jual-aset-demi-bertahan-1107515>). Hal ini menyebabkan pendapatan ikut menurun drastis. Ponco Suseno, wartawan Solopos.com dalam beritanya yang diunggah pada 15 Oktober 2020 menulis bahwa bumdes mengalami minus dana sebesar 70 juta rupiah (<https://www.solopos.com/bisnis-terdampak-covid-19-bum-desa-pongok-klaten-siap-jual-aset-1086610>). Apabila minus dana yang terjadi pada bulan Oktober 2020 sudah menginjak angka 70 juta rupiah, maka pada Februari 2021, di mana pengunjung sudah menurun hingga hampir sembilan puluh persen dari jumlah normal, minus dana juga ikut bertambah. Kondisi ini diperparah oleh pemberlakuan PSBB di Kabupaten Klaten pada 11-25 Januari 2021. Berdasarkan tulisan Taufiq Sidik Prakoso yang diunggah pada laman Solopos.com tanggal 8 Januari 2021, Ronny Roekmito, Tim Ahli Satgas Penanganan Covid-19 Klaten dalam wawancara mengungkapkan bahwa obyek wisata ditutup selama PSBB dilangsungkan (<https://www.solopos.com/penuhi-beberapa-kriteria-pemkab-klaten-pastikan-terapkan-psbb-11-25-januari-1101077>).

Pemerintah Kabupaten Klaten sendiri sebenarnya sudah menerapkan kelonggaran-kelonggaran untuk membantu keberlangsungan obyek wisata. Pada 26 Januari 2021, Mardon Widiyanto, wartawan TribunSolo.com merilis artikel yang mengabarkan bahwa Bupati Klaten, Sri Mulyani memperpanjang

masa PSBB dengan perizinan buka obyek wisata (<https://solo.tribunnews.com/2021/01/26/psbb-klaten-diperpanjang-obyek-wisata-diperbolehkan-buka-pengunjung-dibatasi-30-persen-kapasitas>). Namun kapasitas pengunjung harus dibatasi sebanyak 30 persen dari jumlah normal. Selain itu, jam operasional obyek wisata juga dibatasi hingga pukul 15.00. Perubahan kebijakan ini dapat menjadi titik terang untuk membantu mengatasi kerugian yang dialami Umbul Ponggok pada periode PSBB sebelumnya. Namun dengan pengurangan kapasitas pengunjung, pendapatan yang diperoleh pengelola sektor tidak akan sebanyak jumlah keuntungan sebelum masa pandemi. Kebijakan kapasitas 30 persen dan jam operasional hingga pukul 15.00 ini tetap berlaku sampai masa pandemi mereda. Sayangnya, kelonggaran ini tidak serta merta langsung bisa disambut baik oleh masyarakat. Dengan ketatnya peraturan PSBB dan himbauan untuk tetap berada di rumah selama pandemi covid-19, masyarakat cenderung memilih untuk tetap taat aturan dan tidak berpergian, termasuk pula tidak pergi berlibur dan mengunjungi obyek wisata. Kecenderungan untuk tidak berwisata tersebut didasari oleh ketakutan akan resiko penularan covid-19. Para pengelola perlu menyusun strategi komunikasi agar masyarakat dapat merasa aman untuk berkunjung kembali ke obyek wisata mereka. Dengan begitu, obyek wisata akan dapat bertahan dan berangsur-angsur pulih melalui beberapa penyesuaian.

Strategi komunikasi adalah kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Middleton, 1980 dalam Cangara, 2014). Tujuan komunikasi adalah efek itu sendiri, yakni perubahan yang terjadi dalam diri penerima pesan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pengetahuan atau bahkan sikap. Strategi komunikasi dapat digunakan untuk membantu masalah pengelola Umbul Ponggok demi meyakinkan masyarakat. Diperlukan kombinasi elemen komunikasi yang terbaik juga tepat untuk menyampaikan pesan, dalam hal ini pesan bagi masyarakat agar dapat merasa aman untuk berkunjung ke Umbul Ponggok.

Melalui skripsi ini, peneliti hendak membahas mengenai kombinasi elemen komunikasi seperti apa yang digunakan oleh Bumdes Tirta Mandiri sebagai pengelola Umbul Ponggok untuk tetap bertahan di era pandemi covid-19. Peneliti hendak menggunakan metode analisis SWOT untuk mengkaji situasi yang terjadi dan strategi komunikasi yang disusun oleh Bumdes Tirta Mandiri berdasarkan situasi tersebut. SWOT membagi analisis ke dalam empat unsur, yaitu *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman). Masing-masing kategori dapat menjadi penentu seperti apa strategi yang dibuat oleh Bumdes Tirta Mandiri untuk berkomunikasi dengan khalayak (masyarakat yang menjadi target pasar).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi Bumdes Tirta Mandiri Ponggok, Klaten sebagai pengelola tempat wisata Umbul Ponggok untuk bertahan di tengah situasi pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi komunikasi Bumdes Tirta Mandiri Ponggok, Klaten sebagai pengelola tempat wisata Umbul Ponggok, Klaten untuk tetap bertahan di era pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap strategi komunikasi Bumdes Tirta Mandiri Ponggok, Klaten untuk bertahan di tengah pandemi covid-19 ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam bidang akademis, khususnya penelitian ilmu komunikasi. Selain itu, peneliti juga berharap agar hasil kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau rujukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman baik kepada pihak Bumdes Tirta Mandiri juga masyarakat luas mengenai strategi komunikasi apa yang digunakan oleh tempat wisata untuk bertahan di era pandemi covid-19.

